

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN DIGITALISASI DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selva Saedini¹, Triyuni Soemartono², Harry Nenobais³

Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Prof. Dr.
Moestopo (Beragama) Jakarta

shelshelva@gmail.com / pps@moestopo.ac.id

ABSTRAK

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisa Implementasi Kebijakan Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, analisis yang digunakan adalah metode observasi, studi pustaka, wawancara mendalam, metode dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Teori implementasi Kebijakan Model Edward Gerston yang meliputi Translation Ability, Resources, Limited number of players, Accountability. Kemudian untuk melengkapi data penelitian di tambahkan dengan Teori Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn yang meliputi Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (disposition) para pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, serta Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam proses digitalisasi Kebutuhan tenaga kerja yang terlatih diperlukan dalam menghadapi perubahan teknologi. Kebijakan digitalisasi dibangun untuk kepentingan publik, Televisi sebagai media yang menyiarkan informasi, turut serta membangun perilaku masyarakat melalui konten yang di tayangkan. Tayangan yang edukatif menjadi kekuatan besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan beradab. Dengan diberlakukannya Analog Switch-Off (ASO) masyarakat dapat menikmati kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal. Digitalisasi dapat mendorong inovasi yang lebih baik, penciptaan lapangan kerja, produktivitas, dan mengalokasikan dividen digital dengan dampak ekonomi yang menguntungkan. Dibalik manfaat yang besar, namun pemerintah menghadapi sejumlah tantangan mulai dari sisi infrastruktur, peralatan digital, pemancar sinyal TV digital yang dikenal dengan Set top box serta adaptasi Masyarakat yang dianggap masih belum merata. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai peran kunci dalam mengatur dan mendorong percepatan digitalisasi televisi nasional melalui kebijakan yang ditetapkan. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan dan penelitian terkait penyiaran digital khususnya urgensi digitalisasi penyiaran.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Digitalisasi, Penyiaran.

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the implementation of the National Television Digitalization Acceleration Policy at the Ministry of Communication and Information Technology. This research employs a qualitative method with a descriptive approach, using observation, literature study, in-depth interviews, and documentation methods for data collection. The theoretical framework applied in this study is based on Edward Gerson's Policy Implementation Model, which includes Translation Ability, Resources, Limited Number of Players, and Accountability. Additionally, to complement the research data, the theory of Policy Implementation by Van Meter and Van Horn is also utilized, covering aspects such as Policy Standards and Objectives, Resources, Characteristics of Implementing Agencies, Disposition of the Implementers, Communication between Organizations and Implementing Activities, and the Socioeconomic and Political Context. In the digitalization process, there is a need for a trained workforce to adapt to technological changes. The digitalization policy is built for public interest, with television as a medium for broadcasting information and contributing to societal behavior through the content it airs. Educational programming becomes a significant force in efforts to enlighten and improve the quality of life of the nation. With the implementation of Analog Switch-Off (ASO), society can enjoy more efficient and optimal broadcasting quality. Digitalization can drive better innovation, create

jobs, increase productivity, and allocate digital dividends with positive economic impacts. Despite the great benefits, the government faces several challenges, including issues related to infrastructure, digital equipment, the digital TV signal transmitter known as the Set-Top Box, and the uneven public adaptation to digital television. The Ministry of Communication and Information Technology plays a key role in regulating and accelerating the digitalization of national television through the policies it sets. Through this research, the author attempts to describe and analyze the urgency of digital broadcasting, particularly the importance of digitalization in the broadcasting sector.

Keywords: Implementation, Policy, Digitalization, Broadcasting.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin berkembang pesat salah satunya pada bidang penyiaran pertelevisian di Indonesia. Televisi telah bertransformasi atau mengubah bentuknya, baik dari sisi informasi yang diberikan kepada khalayak atau dari sisi teknologi internal di dalam televisi itu sendiri. Televisi saat ini telah berkembang ke dalam berbagai bentuk, seperti televisi yang menggunakan sistem satelit, jaringan, maupun sistem digital. Menurut Hary Budiarto dkk (2007: 26) Penyiaran TV digital secara umum didefinisikan sebagai pengambilan atau penyimpanan gambar dan suara secara digital, yang pemrosesannya (encoding-multiplexing) termasuk proses transmisi, dilakukan secara digital dan kemudian setelah melalui proses pengiriman melalui udara, proses penerimaan (receiving) pada pesawat penerima, baik penerimaan tetap di rumah (fixed reception) maupun yang bergerak (mobile reception) dilakukan secara digital pula. Dari sisi perkembangan digitalisasi penyiaran global, bahwa

Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial. Televisi terestrial adalah sebuah sistem penyiaran televisi yang tidak melibatkan transmisi satelit. Biasanya menggunakan gelombang radio melalui pemancar atau antena televisi. Istilah ini lebih umum di Eropa, sementara di Amerika Serikat disebut sebagai siaran televisi over-the-air (OTA) yang membutuhkan tuner (televisi) untuk menikmati layanannya. Sebagian besar negara maju di dunia telah melakukan migrasi siaran TV dari analog ke digital. Bahkan ada beberapa yang sudah selesai melakukan cut off analog atau paling tidak sudah menentukan secara resmi kapan waktu penghentian siaran analog. Negara-negara di Asia seperti Jepang telah menyelesaikan proses digitalisasinya di tahun 2011 dan Korea Selatan di tahun 2012. Thailand dan Vietnam pun sudah memulai penyelesaian Analog Switch-Off atau ASO secara bertahap di tahun 2020 ini. Bahkan Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019. Menurut Hidajanto Djamal dan Andi

Fachruddin (2011:321) Era penyiaran digital yang terjadi menghasilkan pelayanan siaran televisi yang memiliki fungsi dalam setiap kanal frekuensi yang dilayani oleh hanya satu industri televisi. Seperti NHK Jepang memiliki satu kanal frekuensi (broadband) dengan tiga saluran siaran televisi digital dan satu saluran televisi high definition (HDTV).

Beberapa negara di Eropa sudah selesai dengan proses digitalisasi televisi lebih dari satu dekade lalu. Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) dan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan Jamak

Budiarto, Hary, dkk. (2007: 26-27). Diversity of Content (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan Diversity of Ownership (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip Diversity of Ownership juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia. Indonesia mengalami era TV digital, pemerintah telah resmi menghentikan siaran analog atau analog switch off (ASO) pada 2 November 2022. Masyarakat dapat menikmati sajian televisi dengan kualitas gambar yang bersih, suara terdengar jernih dan teknologi yang canggih. Dibandingkan dengan analog, kelebihan sinyal digital terletak pada ketahanannya terhadap derau dan kemudahannya untuk diperbaiki (recovery) pada bagian penerimanya dengan suatu kode koreksi kesalahan (error correction code). Keuntungan lainnya adalah pada konsumsi bandwidth yang lebih efisien serta efek interferensi yang lebih rendah dan penggunaan sistem OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) yang tangguh dalam mengatasi efek lintas. Terbentuknya rancangan Undang Undang Cipta Kerja

nomor 11 Tahun 2020 mengimbas pada TV analog yang akan hilang digantikan oleh TV digital. Keputusan itu tertuang dalam Pasal 60A ayat 2 UU Cipta kerja yang menyebut migrasi penyiaran televisi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog (analog switch off) di selesaikan paling lambat dua tahun sejak berlakunya UU tersebut. Sejak tahun 2021 silam Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pemangku kebijakan tertinggi terkait percepatan digitalisasi di Televisi Nasional telah gencar untuk melakukan sosialisasi program Analog Switch Off (ASO). Namun pada kenyataannya kegiatan sosialisasi tersebut tidak mencapai target, lantaran minimnya pemahaman masyarakat tentang TV digital. Selain itu, fasilitas STB (Set Top Box) alat penangkap sinyal digital atau sejenis alat decoder atau receiver yang memiliki fungsi mengatur saluran televisi, diterima tidak merata oleh masyarakat. Apalagi harga STB di setiap toko berbeda-beda dengan kisaran ratusan ribu rupiah dengan merk yang beraneka ragam. Bahkan semenjak diwajibkan penggunaannya harga STB kerap melambung hingga tembus di angka 400 ribu rupiah. Masyarakat menengah ke bawah banyak yang merasa keberatan dengan harga itu ekonomi yang sangat pas-pasan untuk kebutuhan anak dan keluarga. Di samping mahalnya harga STB, kualitas

sinyal signal digital tidak merata serta akses channel terbatas. Ironi rakyat kecil karena kebijakan ini sampai harus beli STB tapi hasilnya siarannya yang diterima tetap saja kurang baik. Hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Poltracking Indonesia pada tahun 2022, hasil survei tersebut menyatakan bahwa lebih banyak masyarakat yang tidak menyetujui dengan kebijakan pemerintah terkait penghentian siaran televisi yang semula berbasis analog kemudian beralih ke siaran berbasis digital. Hasil survei itu menyebut, sebanyak 33,3% publik yang menyatakan kurang setuju dan 7,6% menyatakan sangat tidak setuju atas penghentian siaran tv analog. Sehingga, jika digabungkan, maka publik yang tidak setuju sebesar 40,9%. Tak hanya itu percepatan digitalisasi juga terbentur pada sisi infrastruktur, termasuk pada perihal kebijakan teknologi baru multipleksing (MUX), yaitu sistem pemancar yang dapat menggabungkan beberapa saluran siaran menjadi satu saluran saja. Sejauh ini, pengaturan infrastruktur baru sistem digital ini dianggap belum berpihak pada stasiun televisi lokal. Para pengelola televisi lokal harus menyewa penggunaan MUX tersebut pada instansi yang memenangkan lelang yang notabene adalah perusahaan besar yang berpusat di Jakarta. Sulit bagi mereka untuk bisa memenuhi biaya sewa ini karena pendapatan mereka masih minim, akibat persaingan dengan stasiun televisi yang

dapat beroperasi secara nasional. Hal ini menjadi persoalan sehingga visi eksplorasi dan inovasi konten untuk pelayanan terhadap warga lokal belum bisa mereka optimalkan. Proaktif dalam dunia digital, tidak hanya fokus pada digitalisasi melainkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan terlatih sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan teknologi. Alat-alat canggih tidak akan berguna jika tidak ada yang dapat mengoperasikannya, oleh karena itu digitalisasi harus diiringi dengan pengembangan SDM. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia masih minim memiliki SDM atau tenaga kerja ahli dalam bidang digital. Salah satu hal yang mempersulit peningkatan produktivitas sumber daya manusia (SDM) adalah tidak didukungnya oleh keterampilan yang tepat dalam mengatasi tantangan industrialisasi terutama teknologi dan digitalisasi, karena sebagian besar SDM yang terbatas dan tingkat pendidikan yang rendah, maka sulit untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM untuk bersaing. Apalagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar memiliki berbagai jenis SDM tentang pola pikir, keterampilan, kualitas dan masih banyak lagi. Budaya masyarakat akan berdampak pada Hak asasi manusia, tak sedikit masyarakat yang masih memiliki pola pikir konservatif hal ini tentu

akan menghambat pertumbuhan. Di era digitalisasi seperti ini diperlukan SDM yang dapat berkembang dan berpikir maju yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kebijakan Pemerintah dalam percepatan digitalisasi menjadi poin paling utama, dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki peran kunci dalam mengatur dan mendorong percepatan digitalisasi televisi nasional melalui kebijakan yang ditetapkan. Meskipun kebijakan telah ditetapkan, implementasi kebijakan percepatan digitalisasi televisi nasional menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengadakan penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menganalisis Implementasi Impelementasi Kebijakan Percepatan penulis menggunakan Teori tentang implementasi yang disampaikan oleh **Gerston (2014)**, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu sebagai berikut:

1. Translation ability, adalah kemampuan para pelaksana dalam menerjemahkan

keputusan yang telah ditetapkan.

2. Resources, adalah ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
3. Limited number of players, yaitu pemahaman tentang efisiensi jumlah para pelaksana.
4. Accountability, yaitu tahapan pertanggungjawaban proses pelaksanaan.

Untuk menelengkapi peneliti juga menggunakan **Teori Van Meter & Van Horn, 1975**. Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni Standar dan sasaran kebijakan setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan sasaran kebijakan yang jelas agar dapat mencapai tujuan. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara para agen implementasi.

1. Sumber daya perlu adanya dukungan sumber daya yang baik manusia, material, dan metode dalam implementasi kebijakan. Di antara ketiga sumber daya tersebut yang paling penting adalah sumber daya manusia, karena di samping sebagai subjek implementasi juga termasuk objek kebijakan publik.
2. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Perlu adanya

hubungan yang baik antar instansi yang terkait yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi dalam banyak program implementasi kebijakan. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut agar dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

3. Karakteristik agen pelaksana agar implementasi mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi karena semua ini berpengaruh terhadap implementasi program.
4. Disposisi implementor yang terdiri dari tiga hal. Respon implementor terhadap kebijakan terkait kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan intensitas disposisi implementor preferensi nilai yang dimiliki. Lingkungan kondisi sosial ekonomi dan politik variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, dukungan kelompok-kelompok kepentingan, karakteristik para partisipan, sifat opini publik, dan dukungan elit politik.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti akan menganalisis data- data dan literatur-literatur yang relevan. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian deskriptif Menurut **Rukajat, (2018)** Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari. Sehingga tercapai penjelasan deskriptif dan komprehensif serta sistematis guna terciptanya pemahaman mengenai masalah yang diteliti yaitu mengenai Implementasi Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sumber data dan informasi dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan. Berikut yang termasuk data primer yaitu transkrip hasil wawancara, Laporan dan hasil temuan-temuan saat proses

pelaksanaan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Analis kebijakan Muda Kementerian Komunikasi dan Informatika, Anggota dewan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Direktur Teknik LPP TVRI Jakarta, Broadcast Engineering service Division Head TRANS TV Jakarta dan Masyarakat. Selanjutnya data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, literature dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, studi Pustaka dan dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis Data yang digunakan yaitu reduksi data, triangulasi dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Translation ability

Dalam konsep translation ability, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki pemahaman yang kuat terhadap digitalisasi Televisi terkait manfaat dan tujuannya serta menjalankan regulasi sesuai dengan arahan yang diperintahkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Berkomunikasi secara efektif melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pemahaman yang sama dan

dukungan yang diperlukan dalam melaksanakan digitalisasi, dengan digitalisasi ini kualitas penyiaran semakin meningkat mulai dari menghasilkan siaran televisi yang berkualitas, konten yang lebih baik dan beragam, kualitas audio-visual yang jernih dan canggih, sehingga tidak perlu khawatir dengan faktor cuaca yang buruk, yang dianggap sering kali memberikan pengaruh terhadap kualitas siaran yang berbayang. Siaran analog yang dulunya banyak semut kini dapat dinikmati masyarakat dengan resolusi tinggi.

2. Resources (Sumber Daya Manusia)

Sumber daya (resources) dalam implementasi percepatan digitalisasi televisi nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika merujuk pada berbagai komponen mulai dari jenis modal, personel, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjalankan program digitalisasi tersebut dengan sukses.

Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam menghadapi percepatan digitalisasi televisi nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki cara diantaranya menggunakan jasa konsultan, serta praktisi yang pakar dalam digitalisasi, memperdayakan para pensiun di bidang terkait dengan ilmu serta tenaga yang masih dapat diandalkan yang paham akan digitalisasi. Pegawai Kementerian komunikasi dan Informatika juga diberikan

bekal berupa pelatihan terkait digitalisasi setiap tahunnya, dalam aspek teknis ataupun non teknis. Serta menjalin hubungan baik dengan komunitas digital untuk menambah wawasan dan bertukar informasi terkait digitalisasi.

area perbatasan Jakarta seperti Bekasi dan Depok, masih ada keluhan terkait sinyal yang digital yang masih lemah kendala itu lantaran Belum meratanya jangkauan sinyal digital disebabkan karena kendala teknis dari kesiapan pemancar TV digital oleh lembaga penyiaran yang memiliki hak siar.

Area blank spot atau masih ada area yang belum terjangkau siaran Televisi, penyebab utama terjadinya blank spot karena teknologi siaran TV analog tidak bisa menjangkau kawasan dengan kondisi geografis.

Sistem pemancar multiplexing pun kini menjadi persoalan berkaitan dengan bisnis dari penyelenggara digitalisasi, tak lain pihak industri penyiaran yang berkaitan dengan pengeluaran yang di tanggung oleh masing-masing TV.

3. Limited Of Number Players

Pelaksana TV Digital merupakan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan digitalisasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan lembaga yang menggawangi digitalisasi penyiaran televisi termasuk dalam kebijakannya. Namun secara detail bahwa tugas kementerian komunikasi dan informatika merumuskan kebijakan nasional, kebijakan

pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi layanan multimedia dan desiminasi informasi yang di pimpin oleh Menteri. DPR pun memiliki peran dalam penetapan dan pengawasan anggaran, begitu juga melalui DPR memberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap keputusan termasuk dalam kebijakan digitalisasi Penyiaran. Dalam proses digitalisasi ini Kementerian komunikasi melibatkan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, hal ini juga berdasarkan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mengamantkan KPI sebagai wakil publik yang mengatur urusan penyiaran. Pihak lain yang terlibat adalah Lembaga Penyiaran swasta, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan lima group LPS sebagai penyelenggara (MUX) dalam implementasi program digitalisasi penyiaran, antara lain Media Group, Surya Citra Media (SCM), Trans, Media Nusantara Citra (MNC) dan Rajawali Televisi (RTV). Sementara TVRI menjadi salah satu stasiun televisi nasional yang pertama kali memberikan siaran digital, Kemenkominfo memberikan fasilitasi kepada LPP TVRI dalam modernisasi pemancar, produksi dan kelengkapan penyiaran lainnya yang diperlukan oleh

LPP TVRI untuk menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital.

4. Accountability

Melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan sekitar 6,7 juta set top box yang dibagikan secara gratis kepada keluarga kurang miskin. Tercatat data bahwa sampai Desember 2023 bantuan dari pemerintah mencapai 1.357.178 set top box. Namun tidak sepenuhnya dibagikan oleh pemerintah, lembaga penyiaran swasta juga turut membagikan STB subsidi dengan kewajiban bantuan sekitar 4.330.760 STB. hingga Desember 2023 justru baru menyalurkan sekitar 421.131. itu artinya sampai Desember 2023 total ada 1.778.309 STB subsidi yang sudah dibagikan. Jumlah tersebut masih jauh target awal dengan angka 5.687.938 itu artinya masih sekitar 3,9 juta warga miskin yang belum mendapatkan STB gratis. Persoalan STB di kota masih menjadi keluhan masyarakat kota, bukan lagi sulitnya mendapatkan STB. Kini sudah banyak STB yang diperjual belikan di pasaran dengan kisaran harga 160 ribu sampai 190 ribu rupiah. Namun yang menjadi persoalan justru kualitas dari STB yang di pandang membuat konsumtif lantaran kualitas yang tidak awet dengan jangka waktu 6 sampai 12 bulan harus ganti STB yang baru.

5. Dampak sosial dan Ekonomi

Televisi Digital merupakan bukti berkembangnya Industri media di Indonesia, Konten-konten yang disajikan oleh TV kini beragam atau bisa dibilang memiliki ragam segmentasi berdasarkan kelas ataupun usianya. Sebagai contoh Moji TV yang banyak mengulas konten tayangan anak-anak. TV yang dulu bernama TV O Channel ini, hadir sebagai saluran televisi yang membahas seputar olah raga dan hiburan untuk segmentasi anak-anak.

Dampak sosial yang terjadi kini, banyak pengusaha atau investor yang ingin membuat TV Digital. Untuk dampak sosial yang diamati dari masyarakat, banyak informasi ataupun konten yang menarik yang dapat disaksikan. Hal ini dapat diamati dari masyarakat yang semakin tercerahkan dan tercerdaskan. Dalam hal dampak kebijakan, pemerintah memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan siaran digital yang berkualitas, dengan kualitas video dan audionya setara dengan HD. Dampak sosial yang dialami adalah adanya diseminasi informasi, atau proses penyebaran informasi atau pengetahuan kepada khalayak luas. Masyarakat lebih banyak dan cepat mendapatkan informasi dengan adanya TV digital, informasi berkaitan dari segala aspek termasuk pendidikan untuk anak. Manfaat yang besar dirasakan oleh masyarakat dengan adanya TV Digital, maka masyarakat mendapatkan

tayangan yang variatif, tayangan beragam salah satunya channel dari TV daerah yang menayangkan Konten budaya seperti pagelaran wayang, ketoprak hingga tari tradisional.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada penyelenggarannya berjalan cukup baik. Pada penelitian ini indikator yang terlihat dari Translation ability, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta memiliki pemahaman yang kuat terhadap manfaat dan tujuan percepatan digitalisasi nasional dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, seperti produsen televisi, penyiar, regulator, dan masyarakat umum. Dalam konteks Sumber Daya dalam menghadapi percepatan digitalisasi televisi nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki cara diantaranya menggunakan jasa konsultan, serta praktisi yang pakar dalam digitalisasi, memperdayakan para pension di bidang terkait dengan ilmu serta tenaga yang masih dapat diandalkan yang paham akan digitalisasi. Pegawai Kementerian komunikasi dan Informatika juga diberikan bekal berupa pelatihan terkait digitalisasi setiap tahunnya, dalam aspek teknis ataupun non teknis. Serta menjalin hubungan baik dengan komunitas digital

untuk menambah wawasan dan bertukar informasi terkait digitalisasi. Limited number of players dalam pelaksanaan percepatan digitalisasi nasional berjalan dengan semestinya, mulai dari kementerian komunikasi dan informatika sebagai pembuat kebijakan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengawasi kebijakan, KPI sebagai bagian dari pemerintahan, sebagai regulator, wajib melakukan penyesuaian regulasi pengawasan, Lembaga Penyiaran serta masyarakat pengguna TV digital. Dari sisi Accountability, pendistribusian sudah dilakukan pemerintah meskipun yang di ajukan tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Masih ada sisa yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Persoalan STB di kota masih menjadi keluhan masyarakat.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika dilihat dalam konteks accountability yang meliputi persoalan pendistribusian subsidi Set Top Box yang merata. Selain membebani rakyat miskin, rakyat dalam ekonomi menengah pun merasa keberatan dengan kualitas STB yang dibeli di pasaran dianggap tidak memiliki kualitas yang bagus, di klaim hanya dapat digunakan dengan rentang waktu sekitar enam hingga dua belas bulan lantaran alat yang berguna

untuk menangkap sinyal digital itu mudah panas dan cepat rusak sehingga membuat masyarakat menjadi konsumtif, mau tak mau harus mengganti dan membeli STB baru untuk bisa menikmati TV digital. Sumber daya dalam hal Infrastruktur juga masih terbatas mempengaruhi kualitas siaran termasuk pada sinyal yang terima, sehingga masih di temukan pengguna TV digital dengan sinyal yang tidak stabil sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas siaran dari suara dan gambar. Infrastruktur yang belum merata juga di temukan di daerah-daerah, Dimana masih terdapat wilayah yang blank spot belum dapat terjangkau sinyal TV digital. Adaptasi Masyarakat, masih banyak Masyarakat yang belum bisa memahami mengenai televisi digital terutama bagi Masyarakat dengan Pendidikan yang tidak update soal teknologi tak sedikit yang masih belum memahami dalam teknis penggunaan peralatan digital hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi secara langsung door to door atau praktek dalam penggunaan peralatan TV digital. Pola Multipleksing juga sempat menjadi hambatan akan digitalisasi, TV digital dianggap tidak berpihak dengan TV lokal, gugatan terhadap kebijakan sempat dlayangkan oleh sejumlah TV lokal terhadap kebijakan digitalisasi penyiaran.

Untuk Peluang dan Manfaat dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dilihat dalam faktor lingkungan ekonomi dan sosial, perubahan dirasakan dari sisi teknis TV digital, Kualitas tayangan dari sisi audio-visual menjadi lebih bersih dan jernih suaranya. Hadir program siaran yang lebih bermutu, membina Masyarakat menjadi lebih cepat dan mudah dalam mendapatkan akses informasi. Industri penyiaran semakin berkembang pesat terbukti dengan muncul channel-channel baru, dengan berbagai segmentasi penonton dan program TV seperti TV olahraga, TV Edukasi, TV anak-anak dan masih banyak lagi. Digitalisasi menambah lapangan pekerjaan baru, era digitalisasi merubah system yang konvensional menjadi serba digital. Digitalisasi menciptakan ruang baru yang disebut sebagai dividen digital, mendorong Internet cepat yang akan berdampak terhadap perekonomian yang menguntungkan. Upaya dalam meningkatkan keberhasilan Implementasi Kebijakan Percepatan Digitalisasi Televisi Nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah bekerja sama dengan Lembaga penyelenggara MUX (Televisi Swasta Emtek Group, Media Group, MNC Group, Transmedia, Viva Group) untuk memberikan subsidi Set Top Box kepada rakyat miskin. Meningkatkan

Kualitas Sumber Daya Manusia dengan dengan menambahkan tenaga-tenaga yang ahli di bidang digitalisasi, memberikan Pendidikan serta pelatihan terkait digitalisasi. Berperan aktif berkoordinasi dengan lembaga yang berkaitan erat dengan program digitalisasi TV, termasuk dengan pemerintah daerah setempat, menyebarkan informasi dengan jangkauan luas dengan media Nasional atau local serta secara langsung. Kominfo Bersama TVRI Mengembangkan infrastruktur dengan menjalankan program Digital Broadcasting System (DBS) untuk membangun infrastruktur multipleksing di wilayah blackspot yang menjangkau 113 wilayah blank spot yang sebelumnya tidak dapat terjangkau oleh layanan siaran televisi analog.

SARAN

Dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan percepatan digitalisasi Televisi Nasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka perlu ditempuh strategi sebagai berikut: Sebaiknya mekanisme untuk mendapatkan subsidi STB dipermudah, meskipun Masyarakat penerima subsidi dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, namun pada kenyataannya pembagian STB tidak merata dan tidak tepat sasaran, sebaiknya Kominfo mensinergikan antara data Kementerian

Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan faktual di lapangan agar seluruh rakyat miskin mendapatkan STB dan menikmati siaran TV digital. Pemerintah sebaiknya memberikan standarisasi untuk kualitas STB yang kini beredar di pasaran, agar kualitasnya dapat lebih baik sehingga tidak membebani masyarakat untuk terus membeli STB setiap enam sampai dua belas bulan sekali lantaran kualitas STB yang rentan rusak.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang mencakup kualitas dan cakupan agar seluruh wilayah yang sudah tercover sinyal dapat menikmati siaran dengan baik tanpa terkendala oleh sinyal, kemudian bagi wilayah yang belum mendapatkan sinyal atau blank spot diharapkan dapat menikmati siaran TV digital. Masyarakat diberikan pelatihan atau pengetahuan mengenai digitalisasi, selain melalui sejumlah media online atau offline untuk lebih efektif dilakukan melalui door to door dengan dukungan SDM atau tenaga khusus yang ahli dalam TV digital. Pemerintah memberikan perhatian dengan memastikan seluruh Lembaga yang terlibat dalam digitalisasi TV, melakukan sosialisasi dengan merata dan terstruktur terkait pemahaman dan manfaat terkait program digitalisasi dapat dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hadirnya channel-channel televisi digital yang baru menjadi perhatian pemerintah

untuk melakukan seleksi lebih mendalam terhadap tayangan atau konten karena televisi sebagai media informasi menjadi pengaruh yang besar terhadap perilaku bangsa yang cerdas dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Badjuri. 2010. *Jurnalistik Televisi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- A., Morissan M. dkk. 2017. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Abdul Rahman. 2009. *Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Riset Akuntansi Vol VI No.1*
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: IKAPI.
- Agustinus, Wahyudi. 1996. *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berfikir Strategik*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Andri Irfan, dkk. 2021. *Implementasi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, Sebuah Pendekatan Kebijakan Publik*. CV. Amerta Media.
- Budiarto, Hary, dkk. 2007. *Sistem TV Digital dan Prospeknya di Indonesia*.

- Jakarta: PT. Multikom.
- Budi, Winarno. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Dunn, William N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Erma Prasetyo, A. T. K. 2016. *Manajemen Aplikasi E-Surat Dalam Pengelolaan Arsip Aktif (Studi Kasus Aplikasi E-Surat Di Badan Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Bogor)*. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*.
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Hardani, dkk (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Hidayanto Djamal dan Andi Fachruddin, (2011) *Dasar-Dasar Penyiaran Sejarah Organisasi Operasional dan Regulasi*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- John Vivian. 2003. *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Kapioru. 2014. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis Dan Partisipasi*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*.
- Koentjaraningrat, *Metode Statistik dan Sampling dalam penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1983.
- Mamik. 2014. *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kebidanan*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Mazmanian, D.A and Sabatier, -P.A. 1983. *Implementation and public policy*. London: Scoot, Foresman and company
- Moeloeng, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moh. Pabundu Tika. Aksara. (2015). *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT. Bumi
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan. 2011. *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi "Edisi Revisi"*. Kencana. Jakarta
- Puji rianto, dkk. 2012. *Digitalisasi*

Televisi Indonesia, ekonomi politik, peta persoalan, dan rekomendasi kebijakan. PR2 Media Yayasan Tifa, Yogyakarta

Pujileksono, Sugeng. 2015. Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif. Malang: Kelompok Intrans Publishing.

Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Supriyati. 2012. Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi. Bandung: LABKAT.

Syahida, Agung, Bayu. 2014. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat).

Taufiqurokhman. 2009. Mengenal Sumber Daya Manusia, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Zoebazary, Ilham. (2010). Kamus Istilah Televisi dan Film. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

Zuwidah Dewi, Muzakkir, 2022. Strategi Komunikasi Penyiaran Indonesia (KPI) Mengoptimalkan Migrasi Televisi Digital (Volume 2 Nomor 2)

Marwiyati, Ade Wahyudin, 2019. Implementasi Sistem Siaran Televisi Digital Di Lpp TVRI Stasiun Jawa Tengah. (Volume 17 Nomor 2)

Lina Miftahul Jannah, 2019. Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Indonesia. JPSI (Journal of Public Sector Innovations)

Budi Agussetianingsih, Azhar Kasim, 2021. Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia.

Sumber Lainnya:

<https://www.kominfo.go.id>

<https://www.kpidbali.org/sejarah/>

<https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6473439/banyak-diburu-harga-set-top-box-di-lamongan-tembus-rp-400-ribu>

<https://theconversation.com/sulitnya-televisi-lokal-bermigrasi-digital-bagaimana-solusinya-227293>